

PRRI DALAM PERSPEKTIF MILITER DAN POLITIK REGIONAL: SEBUAH REINTERPRETASI *)

Oleh: Mestika Zed

✓✓

"The present is the result of the past, but it is also this present which makes the future. It was the past which brought Indonesia the present abuses, and we are now at a point which will be decisive for the future Indonesia...."

PRRI Monthly Review (Nov.1960)

Pada tanggal 10 Februari 1958, sebuah badan yang diberi nama *Dewan Perjuangan* melalui RRI Padang membacakan sebuah teks "Piagam Perjuangan" yang berisi sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Soekarno agar "bersedia kembali kepada kedudukannya yang konstitusional dan menghapuskan segala akibat dan tindakan yang melanggar UUD serta membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan...".¹ Tuntutan yang dirinci sebanyak lima butir itu a.l. berbunyi: (1) supaya Kabinet Djuanda dibubarkan dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden; (2) agar dibentuk *Zaken Kabinet Nasional* di bawah suatu Panitia di bawah pimpinan Moh. Hatta dan Hamengkubuwono IX; (3) agar Kabinet Baru diberi mandat sepenuhnya untuk bekerja sampai pemilihan umum yang akan datang; (4) agar Presiden Soekarno/ Pj. Presiden membatasi diri menurut konstitusi; (5) apabila tuntutan di atas tidak dipenuhi dalam tempo 5 x 24 jam, maka Dewan Perjuangan akan mengambil langkah kebijaksanaan sendiri.

Tuntutan yang bernada "ultimatum" itu, ternyata tidak hanya ditujukan kepada Presiden Soekarno saja, melainkan juga kepada Kabinet

*) *Makalah* disampaikan pada seminar "50 Tahun Hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Sub Tema: PRRI." Diselenggarakan oleh Pusat Kajian Wilayah Amerika & Jurusan Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, Jakarta, 27 Oktober 1998.

¹ Teks "Piagam Perjuangan", fotokopi dokumen koleksi Cornell University, Ithaca, N.Y.

Djuanda, kepada anggota DPR dan yang lebih penting kepada "seluruh rakyat Indonesia yang mengingini perbaikan Negara dan Bangsa". Pada saat Dewan Perjuangan mengumumkan pernyataan "Piagam Perjuangan" itu, Presiden Soekarno tidak berada di Indonesia, melainkan sedang berada di Tokyo. Meskipun demikian Kabinet Djuanda buru-buru mengadakan sidang darurat Kabinet dan segera mengambil keputusan penting: menolak tegas "ultimatum" Dewan Perjuangan. Selain itu, KSAD Jend. Nasution, bahkan langsung memecat dan mengeluarkan perintah penangkapan atas para kolonel yang berada di belakang Dewan tersebut. Paling tidak ada tujuh orang kolonel "pembangkang", yang disebut-sebut waktu itu: Letkol. Ahmad Hussein, Ketua Dewan dan yang membacakan "pengumuman", Kol. Zulkifli Lubis, Kol. Mauludin Simbolon, Letkol. Barlian, Kol. A.E. Kawilarang, Letkol. H.N. Ventje Samuel, Kol. J.F. Warouw.² Pada hari-hari berikutnya, pemerintah Djuanda langsung menyiarkan ultimatum balasan via radio dan perintah-perintah: semua untaian *Dewan Perjuangan* ditolak dan sejalan dengan itu dikeluarkan pula perintah pemutusan hubungan darat dan udara dengan Sumatra. Itu kemudian diikuti dengan pembekuan kedua komando militer di Sumatra (TT I Sumatra Utara dan TT II Sumatra Selatan) dan seterusnya.

Sementara itu di Padang, setelah menunggu lima hari "ultimatum" mereka, *Dewan Perjuangan* sudah siap dengan tindakan selanjutnya. Tepat pada tanggal 15 Februari 1958, mereka mengumumkan berdirinya "pemerintahan tandingan", yaitu apa yang mereka namakan *Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia* (PRRI), lengkap dengan susunan Kabinetnya. Sejumlah tokoh sipil dan militer terkemuka di tingkat nasional ikut bergabung di dalamnya.³ Sejak saat itu mereka menganggap diri mereka "terlepas dari kewajiban untuk mentaati Presiden Soekarno"

² Willar H.Hanna, "Bung Karno's Indonesia: Part V: The Indication of the Military", *Southeast Asia Series*, Vol.VII, No. 20: 3.

³ Empat orang di antara mereka seperti Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Moh. Natsir, Mr. Baharuddin Harahap, Mr. Asaat, Dr. Sumitro Djojhadikusumo adalah bagian dari sekitar 10 sampai 12 orang tokoh pemimpin Indonesia paling terkemuka pada periode ini. Demikian juga tokoh militer seperti Kol. Zulkifli Lubis, Kol. Dahlan Djambak, Kawilarang (Atase Militer RI di Washington D.C.) elit militer tingkat nasional yang dihormati dan didukung oleh semua panglima daerah. Willar H.Hanna, "Bung Karno's Indonesia: Part VII: The Rebel Cause", *Southeast Asia Series*, Vol.VII, No. 22: 4.

karena seperti dikutipkan di atas sudah melakukan serangkaian penyimpangan dari konstitusi nasional.

Genderang "perang saudara" sudah ditabuh oleh kedua belah-pihak. Jakarta bersikukuh dengan pendiriannya, sementara PRRI juga tidak bersedia menarik pernyataannya. Di saat kritis dan menegangkan itu masih ada kesempatan dan upaya yang ditempuh untuk menghindari konflik bersenjata antara pemerintah pusat dan PRRI. Namun, tarik-ulur antara pelbagai kekuatan yang begitu kompleks, yang terlibat secara langsung dan tak langsung di dalamnya, mengakibatkan malapetaka tragis itu akhirnya tak dapat dielakkan lagi. Konflik bersenjata itu akhirnya berlangsung selama kurang lebih tiga tahun (1958-1961).

Bagaimanakah kita harus mencermati kembali pengalaman sejarah bangsa yang tak menyenangkan itu? Jika hampir semua pihak menyekalkan terjadinya konflik bersenjata yang amat serius itu di belakang hari, dan bahkan juga pada saat-saat awalnya, siapakah sebenarnya yang diuntungkan dan sebaliknya siapakah yang dirugikan?

Sebagai salah satu dari serangkaian pergolakan daerah yang meletus dalam dekade 1950-an, kasus PRRI adalah yang paling serius dan terbesar, baik dalam skala waktunya, maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dan barangkali juga kebrutalan dan korban yang ditimbulkannya. Kasus PRRI, sebagaimana yang ditunjukkan dalam studi terbaru mengenai masa-masa pancaroba ini, tidak hanya melibatkan pelbagai kekuatan pada tatanan nasional (Presiden Soekarno, partai-partai, militer dan daerah lain) tetapi juga internasional (CIA) dan tentu saja kelompok masyarakat lokal itu sendiri, khususnya kelompok militernya dan kaum politisi beserta rakyatnya.⁴ Oleh karena dimensi yang terakhir ini, sejauh ini, tidak pernah memperoleh kesempatan dan tempat untuk mengemukakan pandangan sejarah mereka dalam wacana sejarah bangsa, maka makalah ini terutama akan menyoroti PRRI dari perspektif militer dan politik lokal, khususnya yang berkembang di Sumatra Barat, habitat

⁴ Pengenalan sejumlah karya terpilih mengenai kasus ini telah diuraikan dengan baik oleh R.Z. Leirissa, "PRRI-PERMESTA. Tinjauan Historiografis", *Makalah* Pusat Kajian Wilayah Amerika dan Jurusan Sejarah, Jakarta, 21 April 1998. Ulasan kritis terhadap karya terbaru yang ditulis oleh Kahin & Kahin (1995) yang kini sudah diterjemahkan ke dalam edisi Indonesia (1998) telah dibahas dalam artikel resensi, lihat Mestika Zed, "Pembangkangan Kolonel dan Keterlibatan Amerika Serikat dalam PRRI", *Tingkap*, Vol. 1, No. 1 (1998), hal. 71-80.

tempat tumbuhnya prakarsa gerakan protes dan malaperaka pergolakan itu.

Di dalam makalah ini akan ditunjukkan, bahwa bahwa isu-isu yang melatarbelakangi gerakan protes PRRI terhadap pusat pada pokoknya mencerminkan isu-isu yang berkembang secara nasional. Baik secara ideologis, maupun kepemimpinan dan pendukungnya gerakan PRRI jauh melampau batas-batas kedaerahan Samatra Barat. Barangkali hanya karena habitat PRRI tumbuh di sana, seperti juga dengan sejarah PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) pada masa agresi kedua (1948-49), sehingga keduanya selalu diasosiasikan dengan orang Sumatra Barat. Namun begitu, sesuai dengan watak khas sejarahnya, memang dapat dilihat, bahwa dalam setiap era perubahan sejarah, para pemimpin dan rakyat Sumatra Barat hampir selalu lebih siap menanggapi setiap perubahan, atau tekanan dan tantangan yang datang dari luar lingkungan mereka.⁵ Dalam tahun 1950-an, sekali lagi, mereka mencoba tampil di depan, namun karena pelbagai faktor, akhirnya gagal dan dengan demikian harus menanggung akibatnya.

Selanjutnya akan dibuktikan pula, bahwa pembelaan mereka atas isu-isu pokok dan esensial sezaman, seperti yang disuarakan oleh gerakan protes mereka sebelum pecahnya pergolakan, juga dibenarkan oleh proses sejarah yang lebih kemudian. Pada masanya suara mereka hilang ditelan oleh gemuruh mesin kekuasaan rejim Soekarno yang semakin sentralistik dan yang digerogeti oleh unsur komunis, sehingga upaya-upaya untuk mencari penyelesaian kompromistik akhirnya menemui jalan buntu. Ini terutama akibat dijegal atau terhalang oleh pelbagai peristiwa, kelompok dan tokoh-tokoh yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di dalamnya, sehingga pergolakan bersenjata tak dapat dielakkan lagi.

Warisan Zaman Revolusi :

Sehabis perang kemerdekaannya (1945-1950), Indonesia sebagai *nation-state* yang baru saja keluar dari suasana perang, berada dalam keadaan berantakan, baik secara fisik maupun psikologis, di samping

⁵ Lihat, Mestika Zed, Edi Utama dan Hasril Chaniago, *Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945-1950* (Jakarta: Sinar Harapan, 1998).

masih mencari-cari format pemerintahan yang sesuai dengan suasana paska revolusi. Optimisme dan harapan akan perubahan nasib bangsa dalam alam merdeka ternyata berubah dengan cepat menjadi perasaan bimbang bercampur frustrasi, kemarahan dan ketidakpastian akibat berbagai persoalan. Sebagian berasal dari warisan zaman perang sebelumnya, dan sebagian lain karena kemacetan-kemacetan dan salah-urus (*misman-agement*) dalam menyelesaikan persoalan baru yang timbul setelah merdeka.

Meskipun Belanda telah terusir dari Indonesia dan para pemimpin mulai menjalankan roda pemerintahannya, namun buah kemerdekaan yang dicita-citakan itu ternyata tidak segera dapat dinikmati oleh banyak orang. Isu-isu sentral yang paling menonjol selama tahun 1950-an seperti ditunjukkan dalam studi-studi terdahulu ialah keadaan ekonomi yang masih morat-marit, bahkan lebih buruk dari keadaan sebelum merdeka. Penyelesaian konflik Indonesia-Belanda lewat Konferensi Meja Bundar (KMB) di penghujung Desember 1949 menyisakan "duri dalam daging" karena Belanda masih tetap mempertahankan Irian Barat sebagai bagian dari koloninya. Itu berarti, bahwa tidak semua wilayah bekas jajahan dikembalikan ke pangkuan ibu-pertiwi. Di samping itu, sejumlah masalah-masalah internal yang amat ruwet dan pelik waktu itu, yang terpenting di antaranya ialah ketidaksabaran pemerintah untuk meneruskan kebijakan RARE (Rasioanalisis dan Reorganisasi) ke dalam tubuh militer dengan melakukan penciutan satuan-satuan militer di daerah dan mutasi-mutasi sejumlah perwiranya, seperti juga intervensi pusat yang berlebihan terhadap urusan daerah, ancaman pergolakan bersenjata dari berbagai daerah, seperti dari unsur Islam (DI/ TII) di Aceh dan Jawa Barat, dan gerakan separatis di Kalimantan Barat dan Maluku. Selanjutnya semakin meningkatnya kekuatan komunis sebagai "counter-party" di panggung politik Indonesia dan retaknya hubungan "dwi-tunggal" Soekarno-Hatta sejak pertengahan kedua tahun 1950-an dan klimaksnya ialah hegemoni kekuasaan Presiden Soekarno yang semakin otoriter dan sentralistik dengan menggunakan ideologi "demokrasi terpimpin".

Tumpukan masalah ruwet dan pelik ini telah semakin memperburuk keadaan psikologis bangsa yang baru merdeka itu. Begitulah di saat keadaan ekonomi dan politik berantakan disertai dengan ketidakpuasan massal, kaum politisi dan perwira militer yang dilanda frustrasi mencoba

mencari jalan keluarnya dengan cara mereka sendiri. Dalam konteks inilah prakondisi yang melahirkan PRRI itu haruslah dilihat.

Konteks Lokal Sumatra Tengah : Ambruknya Dua Benteng Demokrasi

Selama penggal kedua tahun 1949, keadaan psikologis di Sumatera Barat berubah secara dramatis. Walaupun perjuangan menentang Belanda belum sepenuhnya berakhir, fokus perhatian utama mendadak berubah dari perjuangan melawan Belanda ke situasi pasca-perang. Setelah lebih dari empat tahun perang gerilya menyusul setelah tahun-tahun yang sulit zaman Jepang, dan berlanjut dengan pengembaraan di hutan-hutan melindungi pemimpin PDRI setelah agresi kedua,⁶ sebagian besar para pemimpin militer dan sipil beserta rakyat Sumatera Barat merasa kenyang dengan peperangan dan berharap dapat sedikit menarik nafas dari kejenuhan perang dan dari keharusan melayani tuntutan-tuntutan sepihak dari pemerintah pusat.

Namun harapan itu berubah menjadi kekecewaan. Saat memasuki tahun 1950, para pemimpin dan rakyat Sumatera Barat mendapatkan diri mereka dalam situasi tekanan dan desakan pusat untuk segera melaksanakan perintah-perintah yang dipandang terlalu dipaksakan tanpa memberikan sedikit rongga otonomi untuk menyelesaikan urusan daerah mereka. Dua jurus mematikan pada awal tahun 1950 datang dari dua arah yang berbeda. Pertama dari komando militer pusat, dalam hal ini, dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal A.H. Nasution dan yang kedua dari Kementerian Dalam Negeri. Keduanya pada saat yang sama berakumulasi menyediakan prakondisi ke arah meletusnya pergolakan dan ketika kasus pergolakan bersenjata itu benar-benar terjadi, pihak resmi dan para pendukungnya menganggap kasus itu hanyalah "petualangan" dari segelintir elit militer dan karena itu menganggap kasusnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tetapi sejarah membuktikan lain, ketika konflik bersenjata itu menjadi berlarut-larut hingga

⁶ Tentang PDRI yang sering dicampuradukkan dengan PRRI, lihat buku saya, Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle. Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Sebuah Matarantai Sejarah yang Terlupakan* (Jakarta: Grafiti, 1997).

berlangsung selama beberapa tahun sebelum akhirnya dapat ditumpas oleh mesin perang pusat.

Dari sudut pandangan daerah, intervensi negara yang amat berlebihan terhadap jajaran militer dan politik sipil di tingkat lokal merupakan skenario politik nasional yang sengaja menghancurkan dua benteng demokrasi di daerah: pertama dihapuskannya kesatuan Divisi IX Banteng, dengan cara "membonsaikan"-nya menjadi hanya satu brigade, yaitu Brigade Banteng dan kemudian dibonsaikan lagi menjadi hanya satu resimen saja, yaitu Resimen IV Sumatra dengan sejumlah tindakan lain, sehingga sejak itu pengebirian sistematis terhadap kekuatan militer Sumatra Barat semakin sempurna. Kedua, penghapusan DPRST (Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Tengah) oleh Kementerian Dalam Negeri. Akibatnya, "Tanah Minang yang demokratis tak lagi punya alat perlengkapan demokrasi", ujar sorang pelaku sejarah. Marilah kita bahas persoalan ini secara satu persatu.

Pertama kelompok militer. Para perwira militer di Sumatra Barat sejak semula sudah terikat erat-erat dengan komitmen ideologi proklamasi, seperti yang ditekankan oleh "Bapak Tentara", Jenderal Soedirman, bahwa tentara adalah "benteng pertahanan bangsa". Selama hampir lima tahun perjuangan kemerdekaan Indonesia, para pemimpin militer dan sipil serta rakyat Sumatra Barat, seperti juga di daerah lain, telah terbiasa menyelesaikan urusan mereka sendiri-sendiri. Sifat otonomi perjuangan ini sebetulnya dikondisikan oleh keadaan sezaman, khususnya karena sulitnya alat komunikasi dan tidak adanya batuan riil yang dapat diharapkan dari pusat yang masih lemah, kecuali petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi dalam mempersatukan gerak perjuangan. Kondisi ini membuat daerah terpaksa dan terbiasa untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi.

Dari sudut pandang militer daerah, RARE (Rasionalisasi dan Reorganisasi) hanyalah instrumen kekuasaan pusat yang dimainkan untuk mengontrol kekuatan daerah bagi kepentingan politik yang semakin sentralistik. Artinya kebijakan itu terlalu menekankan kalkulasi rasional di atas kertas, tetapi mengabaikan semangat perjuangan yang telah dibina sejak perang kemerdekaan, di samping *esprit de corps* atau sentimen primordial di antara prajurit daerah yang amat beragam itu.

Sejak akhir Desember 1949 atau menjelang penyerahan kedaulatan, menjadi jelas, bahwa tujuan utama dari pemerintah ialah untuk

meneruskan kebijakan RARE yang terhenti karena sebelumnya tenaga mereka masih dibutuhkan untuk menghadapi agresi Belanda kedua, ialah pembubaran sebagian besar anggota militer dalam divisi-divisi Sumatra.

Ada sekitar dua pertiga pasukan yang di PHK-kan. Sejalan dengan itu, Divisi IX Banteng (resminya saat itu adalah Komando Subteritorial IX), akan dikurangi menjadi hanya satu brigade (Brigade Banteng), yang terdiri dari empat batalyon saja.⁷ Tetapi kemudian dicitkan lagi menjadi hanya satu resimen, yaitu Resimen IV Sumatra Barat. Sejak semula para perwira Sumatra Barat amat sulit menerima kebijakan RARE dan tidak dapat dibayangkan betapa kecewanya mereka jika itu harus dipaksakan untuk diteruskan. Alasannya sederhana saja. Setelah berhasil membangun kekuatan militer yang tangguh dan terbaik di Sumatra,⁸ Divisi IX Banteng - yang berpusat di Bukittinggi, sekaligus menjadi pusat TRI (kemudian TNI) Sumatra selama perang kemerdekaan - kini setelah revolusi usai, tenaga mereka seakan-akan tidak diperlukan lagi. "Habis manis sepah dibuang". Tiga divisi di Sumatra dicitkan menjadi dua divisi saja. Tetapi mengapa hanya Divisi IX Banteng (Sumatra Tengah) yang harus dihapuskan, sementara rekan mereka dalam dua divisi TNI Sumatra yang lain, tetap dipertahankan, kecuali hanya dengan mengubah nama dengan TT I Sumatra Utara di Medan dan TT II Sumatra Selatan di Palembang.

Para perwira dan jajaran tentara di daerah memandang tindakan RARE sebagai "amputasi dan sayatan yang tiada ampun" ke dalam tubuh Divisi IX Banteng. Bukan hanya karena kesatuan mereka telah dikerdilkan, melainkan juga karena banyak para perwira mereka yang memilih keluar dari tentara, sementara sebagian besar prajurit di lapisan bawah yang dirumahkan atau *demobilisan* untuk meminjam istilah seo-

⁷ Dua Brigade di Sumatra Tengah, masing-masingnya Brigade "Banteng" di Sumatra Barat di bawah komandannya Mayor A. Thalib dan Brigade "Babiri" di Riau di bawah Letkol. Akil Prawiradiredja nantinya secara organik dimasukkan menjadi bagian atau di bawah komando Teritorium I di Medan sejak tanggal 1 November 1950 dan pada tahun berikutnya kasatuan mereka akhirnya hanya tinggal satu resimen saja (Resimen IV Sumatra Barat).

⁸ Bukti-bukti dari sumber Belanda dan militer Sumatra pada masa revolusi telah dikemukakan secara rinci dalam studi saya tentang *GiyΩgun Sumatra (1998)*.

rang penulis, tidak memiliki jaminan ke mana mereka harus disalurkan. Cukup menimbulkan *shock* juga ialah karena sebagian perwira senior yang masih bertahan dimutasikan pula. Sebagai contoh misalnya, sejak bulan Desember 1950, Letkol. Dahlan Djambek, Komandan Brigade Banteng, dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat (MABAD), kemudian diangkat menjadi Atase Militer di London. Dahlan Djambek kemudian digantikan oleh Letkol. Thalib. Tetapi tak lama kemudian ia dipindahkan pula ke staf TT 1 Medan dan sejak itu naiklah Major Ahmad Hussein sebagai penggantinya sebagai kemandan satuan yang baru, Resimen IV Sumatra Barat yang brinduk ke TT I di Medan:

Saat Dahlan Djambek menyampaikan keputusan tentang kepindahannya dalam sebuah pertemuan dengan para komandan batalyon di Bukittinggi, salah seorang di antara mereka, Kapten Sjoeb, spontan berdiri dan memberikan reaksinya: "Itu dirasa kurang adil", protesnya. "Sama dengan sebuah kapal yang akan karam, kaptennya menyelamatkan diri duluan dengan seckoci". Semua perwira yang hadir tiba-tiba ribut dan secara serentak menyokong pernyataan Sjoeb. Dahlan Djambek langsung balik menjawab: "Jika kamu sekalian merasa mampu membantah keputusan itu, silakan ke Jakarta menghadap Nasution".

Sesuai dengan sifatnya, ketundukan kepada atasan adalah etika tentara. Tetapi *tour of duty* pusat tampak sangat subordinatif. Sebagian menilai, Dahlan Djambek, tidak berbuat banyak untuk melindungi *anak buahnya*; karena terlalu tunduk kepada atasannya di Jakarta...⁹ Sebagian lain menilai, bahwa Nasution memiliki kepentingan pribadi untuk "mengatur" militer Sumatra Barat seperti yang diinginkannya atau paling tidak terhadap beberapa orang perwiranya. Tindakan ini juga dilakukan oleh Nasution kepada Kol. Simbolon, Panglima TT I di Medan dengan usaha memindahkannya ke Markas Besar Angkatan Darat (MABAD) dan bermaksud menggantikannya dengan Kol. Zulkifli Lubis, Wakil KASAD dan bekas Kepala Intelijen yang tidak sejalan dengan haluannya. Tetapi sebagaimana ternyata kemudian, kedua perwira ini menolak, suatu faktor lain yang memperburuk hubungan intern dalam

⁹ Dokumen Wawancara Audrey Kehin dengan Sjoeb (Jakarta), 19 April 1976 dan dikonfirmasi kembali dalam wawancara penulis Sjoeb, Padang 10 Oktober 1998.

kepemimpinan militer, khususnya antara kelompok "kolonel pembangkang" dengan kebijaksanaan komando pusat angkatan darat.

Dalam kaitannya dengan Divisi IX Banteng khususnya, para perwiranya benar-benar tengah merasakan dan menyaksikan kesatuan mereka sedang ditenggelamkan, apabila kesatuan mereka yang lama kini hanya tersisa satu resimen saja. Tetapi Kapten Sjoeb dan rekan-rekannya masih berusaha menyelamatkannya. Ketika menghadap Nasution di Jakarta, ia masih menaruh harapan. Jenderal KSAD itu menanggapi permintaan mereka dengan tenang tanpa memperlihatkan reaksi marah. Tetapi jawaban yang mereka terima, cukup ketus dan jelas, sekali lagi, menimbulkan kekecewaan: "... sebagai komandan batalyon kamu tidak seharusnya datang ke sini; jika toh ada yang akan kamu sampaikan ke pihak atasan, seharusnya menghadap ke Medan".

Perasaan umum waktu itu mengatakan bahwa tidak ada lagi jalan keluar kecuali menerima kenyataan pahit, bahwa bekas Divisi IX Banteng Sumatera Barat telah dikerdilkan dan direndahkan derajatnya, sehingga mengakibatkan anggota pasukan mereka bercerai-berai dari sebuah kesatuan yang begitu solid dan relatif homogen dari sudut etnik. Kekecewaan ini sungguh-sungguh mencerminkan pengalaman pahit dari orang militer seperti tercermin dari pernyataan salah seorang bekas perwira seniornya. "Divisi ini lebih cepat diorganisir dan lebih baik dalam menjalankan tugasnya ketimbang divisi Sumatera Utara dan daerah-daerah lain....Dibandingkan dengan divisi-divisi di Medan dan Palembang, Divisi IX tak pernah kalah..." Bahkan jika dibandingkan dengan pasukan di Jawa, yang tidak mampu melindungi para pemimpin (Soekarno-Hatta dan sejumlah menteri) dari penangkapan Belanda pada masa agresi kedua, militer Sumatra Barat merasa lebih mendingan karena walaupun harus mundur dan bergerilya di pedalaman, mereka toh masih tetap mampu mempertahankan negeri dan melindungi pemimpin PDRI (Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan para menterinya) dari penangkapan Belanda. Tetapi mengapa KSAD Nasution begitu tega mengampulasi Divisi Banteng, lalu memutuskan untuk menempatkan divisi Sumatera Barat di bawah komando Medan?

Setelah gagal untuk menghentikan campur tangan pusat beberapa orang perwira senior Divisi IX Banteng, memilih mengundurkan diri dari dinas militer dan kembali ke kehidupan sipil. Komandan mereka yang paling senior, Kol. Ismael Lengah telah lebih duluan minta dipensiunkan.

Belakangan bekas komandannya yang terakhir, Letkol. Dahlan Ibrahim, dan Kepala Staf-nya, Letkol. Abdoel Halim. Kebanyakan mereka yang keluar dari militer pada awal 1950-an bertebaran mencari hidup di mana-mana; sebagian pulang kampung, sebagian lain merantau ke Jakarta atau ke daerah lain. Ini kemudian menjadi salah satu alasan untuk mengadakan reuni Dewan Banteng di Padang pada tahun 1956 nanti.

Tetapi penggerogotan terhadap bekas Divisi Banteng tidak hanya sampai di situ saja. Pukulan telak bagi militer Sumatra Barat terjadi lagi pada tahun berikutnya ketika tiga dari empat batalyonnya dikirim ke luar Sumatra untuk menumpas pergolakan daerah di berbagai tempat. Batalyon 101 (Kuranji) dikirim ke Jawa Barat untuk menumpas Gerakan DI/TII; batalyon 102 (Pagarryung) ke Pontianak, dan akhirnya Batalyon 106 dikirim ke Ambon. Kemudian setelah menyelesaikan tugas mereka di sana, mereka tidak lagi dikembalikan pulang, melainkan digabungkan dengan Divisi Siliwangi, Jawa Barat. Kalau begitu berapakah jumlah mereka yang masih tersisa bertahan dan tinggal di daerah?

Memasuki tahun 1953 dan tahun-tahun berikutnya militer Sumatra Barat telah kehilangan begitu banyak pasukan mereka, baik karena dipindah-tugaskan atau keluar atas kemauan sendiri dari militer.¹⁰ Hanya satu batalyon yang tetap tinggal di Sumatra Barat dan satu batalyon lagi didatangkan dari Siliwangi. Mereka nantinya digabungkan di bawah Batalyon Beruang Putih yang berpusat di Padang. Kekecewaan dalam tubuh militer Sumatra Barat diperburuk lagi oleh masalah-masalah besar yang dihadapi di tingkat nasional seperti yang disebutkan di atas. Sebelum melihat bagaimana isu-isu nasional mempengaruhi lahirnya *Dewan Banteng* dan prakarsa yang diambilnya, marilah kita sejenak memberikan perhatian sekedarnya pemerintah sipil dan kaum politisi daerah yang mengalami nasib yang sama seperti rekan mereka dari kalangan militer. Yaitu dihapuskannya badan legislatif daerah, yaitu apa yang dikenal dengan DPRST akhir tahun 1950.

Sejalan dengan upayanya untuk menciptakan suatu pemerintah pusat yang efektif, maka kebijakan pemerintah Jakarta mulai bergeser dari yang selama ini bersifat otonom kepada over-sentralistik. Seperti halnya dengan kalangan perwira militernya, para pemimpin sipil Sumatra Barat

¹⁰ *Propinsi Sumatra Tengah* (c.1953: hal. 593-598); *Sedjarah Kodam III/17 Agustus*, hal. 139-141.

memandang *tour of duty* pemerintah pusat terhadap daerah kelewat subordinatif. Tetapi kali ini anak panah datang dari Perdana Menteri Moh. Natsir via Menteri Dalam Negeri, Mr. Asaad, yang keduanya adalah putra Sumatra Barat. Latar belakang peristiwa ini berkaitan dengan pemilihan Gubernur yang baru tahun 1950. Sebanyak empat calon yang dipilih oleh DPRST dikirim ke Jakarta. Mereka adalah Iljas Jacob (Masyumi), dr. M. Djamil, dr. A. Rahim Usman (?) dan Mr. St. Moh. Rasjid (sosialis) tetapi yang terakhir ini kemudian menolak untuk dicalonkan. Namun apa yang terjadi berikutnya ialah, bahwa tidak satupun di antara calon yang diajukan daerah itu dapat diterima pusat. Gubernur definitif yang ditetapkan pusat justru tokoh titipan pusat, yaitu Ruslan Mulyohardjo, tokoh Jawa dari Partai Masyumi.

Keputusan itu sangat mengejutkan anggota DPRST; "ibarat bom atom yang dijatuhkan tiba-tiba", tulis sebuah dokumen. Merasa tidak pernah dikonsultasikan dengan mereka terlebih dulu, keputusan itu segera "di-*retour afzender*-kan" (ditolak) daerah ke pusat dan pejabat sementara Gubernur Sumatra Barat, S.J. St. Mangkuto (Masyumi),¹¹ dilarang untuk menyerahkan jabatannya kepada Ruslan, yang sudah terlanjur datang ke Padang pada akhir 1950. Namun, karena arif dengan situasi yang sedang berkembang, ia terpaksa kembali ke Jakarta.

Tetapi, sekali lagi konflik antara daerah dan pusat dimenangkan oleh Yogyakarta. Untuk melicinkan jalan bagi Ruslan, Menteri Dalam Negeri melakukan tindakan yang tidak diduga-duga sama sekali: membubarkan DPRST dan sejak itu Ruslan kembali ke Sumatra Barat menduduki kursi Gubernur. Sampai setelah Pemilu 1955, para pemimpin dan rakyat Sumatra Barat berada dalam ketidakpastian dalam jajaran militer dan pemimpin sipil mereka. Seperti telah dikutipkan di atas, "Tanah Minang yang demokratis tak punya alat perlengkapan demokrasi".

¹¹ Sejak tahun 1950 Gubernur Militer yang lama (dipegang oleh Mr. St. Moh. Rasjid) dihapuskan, dan tokoh yang bersangkutan diminta untuk meneruskan jabatannya, namun karena terikat dengan penunjukkan sebagai seorang anggota delegasi Indonesia ke KMB, posisi ini dipegang oleh Mr. Moh. Nasroen, tokoh nasionalis yang dianggap terlalu "lamban" dan cenderung Jakarta-sentris. Konflik antara dirinya dengan DPRST kemudian membuatnya mengundurkan diri dari jabatan Gubernur. Sejak itu diangkatlah Pejabat Gubernur Sementara, Saleh St. Mangkuto, aktifis Muhammadiyah sejak sebelum perang dan kolega dekat tokoh senior lainnya, Iljas Jacob, mantan "digulis" yang kembali ke daerah setelah proklamasi.

Retaknya hubungan antara daerah dan pusat bukan tidak membawa konsekuensi langsung dan serius terhadap kelancaran roda pemerintahan serta pembangunan daerah. Di dalam tubuh birokrasi, misalnya, perasaan menusuk yang tidak mudah dihilangkan begitu saja timbul dari friksi-friksi antara pegawai federal (RIS) di satu pihak dan pegawai Republik di lain pihak. Yang pertama adalah orang Indonesia yang tetap tinggal di dalam kota dan bekerja sama dengan pemerintah Belanda pada masa agresi (PDRI) dan yang kedua ialah pegawai Republik, yang terpaksa meninggalkan kota karena ikut mengungsi ke pedalaman selama perang kemerdekaan. Setelah penyerahan kedaulatan, atas instruksi pusat, pegawai federal diperbolehkan "melaporkan diri" untuk bergabung dengan pegawai Republik.

Namun konflik psikhis dalam tubuh birokrasi itu juga tampak sekali pengaruhnya dalam pelayanan sektor publik. Sikap pro dan kontra terhadap unsur "Co" (federal atau pro-Belanda) dan "Non-Co" (pro-Republik) - mirip dengan aliran kepartaian sebelum perang - juga muncul di kalangan pegawai dan pedagang kota. Selama ditinggalkan penduduk, kota-kota di Sumatra Barat, seperti juga di tempat lain, hanya didiami oleh orang Cina dan pegawai federal atau penduduk yang tidak ikut mengungsi. Toko-toko dan daerah pasar yang ditinggalkan oleh pemilik atau penyewanya, diambil-alih oleh orang Cina atau orang-orang yang mendapat kemudahan dari pegawai yang bekerja sama dengan Belanda.

Setelah penyerahan kedaulatan, mereka tidak mau mengembalikannya begitu saja tempat yang sudah mereka diami berdasarkan kontrak-kontrak dengan penguasa kota sebelumnya. Sikap pilih kasih dan kesemrautan penanganan pemerintah kota, terutama dalam penyelesaian soal "perampasan" toko-toko dan pasar ini menimbulkan ketidakpuasan umum di kalangan "saudagar gerilya" atau pedagang-pedagang lama. Ketidakpuasan massal ini akhirnya mencapai puncaknya saat dilancarkan demonstrasi besar-besaran lewat apa yang dikenal dengan demonstrasi "nasi bungkus".¹² Demonstrasi "nasi bungkus", adalah cerminan ketidakpuasan umum terhadap penelantaran nasib rakyat. Ia mengandung pesan yang begitu gamblang, bahwa pada masa perjuangan rakyat-

¹² Tentang aksi demonstrasi "nasi bungkus" dalam kaitan dengan kekecewaan politik sipil lihat Mestika Zed dkk *Sumatra Barat* (1998), hal. 115ff.

lah yang mensubsidi nyawa para pejabat pemerintah dan militer, sehingga kemerdekaan bisa dicapai dan kini mereka menagih sedikit perhatian agar pemerintah dan kaum politisi lebih bersungguh-sungguh mengurus perbaikan nasib rakyat.

Tidak begitu sukar untuk memahami mengapa ketidakpuasan dan ketaksabaran masyarakat melihat perilaku pemimpin mereka yang sejak masa kolonial lebih suka berpolitik (istilah sumber Belanda "keranjingan politik") daripada memperhatikan persoalan riil yang dihadapi rakyat pada waktu itu. Jembatan-jembatan dan jalan yang hancur, gedung-gedung serta toko-toko dan rumah yang terbakar akibat politik bumihangus di masa perang masih berantakan dan belum tampak tanda-tanda akan diperbaiki, sementara kebutuhan pokok sehari-hari belum terpenuhi secara normal. Meskipun data spesifik mengenai keadaan perekonomian daerah ini tidak tersedia, namun kesulitan ekonomi waktu itu, bahkan lebih buruk daripada masa sebelum perang.¹³ Ini pada gilirannya ikut memperburuk keadaan psikologis rakyat yang mendambakan perbaikan atas nasib mereka. Buah kemerdekaan yang dicita-citakan itu ternyata tidak segera dapat dinikmati oleh banyak orang.

Keadaan ekonomi yang menyedihkan, ditambah persoalan-persoalan politik nasional di tingkat pusat, yang sangat menonjol waktu itu ialah masalah Irian Barat (sekarang Irian Jaya), mutasi-mutasi para pejabat dan mulainya persaingan dalam perebutan pengaruh di lingkaran partai-partai menjelang Pemilu 1955 memperuncam persoalan riil yang dihadapi rakyat. Dalam suasana ketidakpuasan massal semacam itu, kelompok militer dan kaum politisi lokal yang tengah dilanda frustrasi mencoba mencari jalan keluar sendiri-sendiri dari krisis ekonomi yang dihadapi. Kelompok militer, dalam hal ini, mengambil langkah sendiri dengan mencoba memenuhi kebutuhan logistik dan kesejahteraan prajurit mereka dengan penyelundupan, dan ini nantinya turut mempertajam konflik regional dan pusat.

Panggung Politik Nasional: Soekarno, Militer dan PKI

Nasib malang yang menimpa Indonesia dalam era demokrasi liberal tahun 1950-an telah ditandai oleh pemerintahan yang tak stabil.

¹³ Kahin and Kahin *Subversion as Foreign Policy* (1995), p. 36.

Antara tahun 1950-1957 ada tujuh kali jatuh-bangun kabinet parlementer. Tidak satupun pemerintah pasca-revolusi yang dapat memuaskan harapan rakyat setelah kemenangan perjuangan nasionalis melawan kolonialisme Belanda. Sejak itu, orang mulai meragukan apakah segala penderitaan di zaman penjajahan, seperti yang sering dipidatukan Presiden Soekarno adalah disebabkan oleh dominasi kolonial Belanda? Sebab dengan terusirnya Belanda dari Indonesia orang mengharapkan datangnya zaman keemasan, tetapi sampai pertengahan 1950-an, keadaan perekonomian Indonesia tetap morat-marit, bahkan lebih buruk daripada zaman sebelum perang.

Dalam masa pancaroba yang penuh gejolak semacam itu, paling tidak ada tiga pemain utama di arena panggung politik nasional. Yang pertama adalah partai-partai yang bersaing satu sama lain, jumlahnya mencapai sekitar 130 partai. Kedua adalah militer, khususnya persaingan dalam jajaran kepemimpinan Angkatan Darat dan akhirnya yang ketiga ialah dominasi Presiden Sukarno sendiri. Tentu saja polarisasi dalam per-caturan politik Indonesia periode ini jauh lebih kompleks daripada sekedar menyederhanakan interaksi dan perebutan pengaruh antara ketiga pemain utama itu. Suatu ikatan-ikatan longgar setelah pasca-revolusi mencerminkan pergumulan antara pelbagai kekuatan utama seperti kelompok Islam (khususnya Masyumi), nasionalis sekuler (termasuk sosialis atau PSI), komunis, kelompok militer (khususnya Angkatan Darat), Jawa dan non-Jawa dan kelompok elit lain di luar itu yang sedang mencari-cari peranan baru yang akan mereka mainkan dalam perpolitikan Indonesia tahun 1950-an.

Sekarang marilah kita sebentar kembali menyoroti kelompok pertama: partai-partai politik. Pemilu 1955 menghasilkan "empat besar" partai pemenang, masing-masing PNI, Partai Islam Masyumi, NU dan PKI. Partai Masyumi khususnya memperoleh pendukung yang terkuat di luar Jawa. Akan tetapi tampilnya PKI sebagai salah satu dari "empat besar" amat mengejutkan elit politik di pusat dan di daerah, khususnya kalangan politisi PNI dan juga kelompok Islam, yang semakin cemas akan ancaman potensial yang akan timbul daripadanya. Semula banyak orang yang mengira, bahwa PKI tidak akan pernah tampil kembali sebagai ancaman potensial sejak pukulan terakhir terhadap pengikut partai itu ketika mereka menusuk Republik dari belakang lewat "pemberontakan" Madiun tahun 1948 itu. Namun setelah revolusi partai itu nyatanya tumbuh kem-

bali dan semakin bergerak ke arah politik "mengambil hati" Soekarno, yang secara paradoks "mengaku menjadi seorang Marxis yang taat, di samping sebagai seorang nasionalis dan Islam yang taat".¹⁴

Pemain utama lainnya ialah kelompok militer, khususnya angkatan darat. Perjalanan sejarah negeri ini amat dekat dengan kelompok ini. Salah satu tema penting dalam sejarah Indonesia ialah hubungan politik sipil dan militer, tetapi persaingan interes di kalangan elit militer itu sendiri juga cukup tajam pada masa ini. Salah satu faktor penyebabnya ialah bahwa sejak meninggalnya Panglima Besar Sudirman, tidak ada perwira senior yang mampu menggantikannya sebagai "Bapak Tentara" yang dapat diterima oleh hampir semua perwira dari pelbagai latar belakang dan golongan, baik karena kharisma dan kewibawaan pribadinya, maupun karena kepemimpinannya. Kebanyakan perwira pengantinya kemudian relatif seimbang dengan segala plus-minusnya.

Tokoh-tokoh Nasution, T.B. Simatupang dan Kawilarang adalah perwira yang bermutu dan meskipun memiliki latar belakang pendidikan KNIL (Belanda), tak ada yang meragukan nasionalisme pro Republik mereka. Namun di antaranya adalah Nasution yang memiliki kedudukan paling kuat, pemikir militer dan lebih dekat dengan orbit kekuasaan Sukarno. Lagi pula, dia adalah seorang muslim, suatu konvensi yang sering dijadikan ukuran dalam pucuk pimpinan nasional. Di luar itu terdapat sejumlah perwira bekas PETA dan yang paling senior di antaranya Zulkifli Lubis, Bambang Supeno dan semua panglima-panglima di daerah umumnya adalah bekas perwira didikan Jepang (PETA di Jawa dan *Giyûgun* di luar Jawa).

Akan tetapi polarisasi yang lebih menonjol nantinya antara kaum loyalis di bawah Nasution dan kelompok regionalis dan pengikutnya yang didukung oleh semua panglima daerah luar Jawa. Dalam satu hal mereka memiliki pandangan sama terhadap komunis sebagai ancaman potensial yang harus dibendung agar jangan masuk ke lingkaran kekuasaan. Kelompok regionalis umumnya tidak senang dengan pemusatan kekuasaan di Jawa umumnya dan di Jakarta khususnya. Kelompok ini

¹⁴ Dikutip dari Bernad Dahm, *Soekarno and the Struggle for Indonesian Independence* (Ithaca and London: Cornell University Pres, 1969), hal. 200.

menuduh pemerintah pusat terlalu sentralistik (*over-centralization*), terlalu birokratis dan cenderung mengabaikan kepentingan luar Jawa, korupsi, tidak begitu awas dengan pengaruh komunis yang semakin dekat kepada sumbu kekuasaan.¹⁵

Reaksi terbuka mereka terhadap Nasution ialah berkenaan dengan kebijakan RARE. Tidak ada panglima daerah yang mampu mencegahnya, tetapi di pusat kebijakan itu dikritik oleh lawan-lawannya karena dianggap terlalu sentralistik dan mereka bersimpati kepada jajaran militer di daerah yang menjadi korbannya. Mereka tidak mendukung kebijaksanaan RARE yang dilaksanakan Nasution. RARE terlalu "menekankan aspek rasional di atas kertas dan sebaliknya mengabaikan semangat perjuangan yang tumbuh selama perang kemerdekaan".¹⁶ Lagi pula, sejak awal 1950-an, dan sebenarnya sudah berlangsung zaman perang kemerdekaan, kepentingan-kepentingan daerah berkaitan erat dengan urusan-urusan pihak militer, khususnya peranan panglima-panglima daerah dalam menjalin hubungan bisnis dengan instansi-instansi sipil di luar Jawa. Ini mereka lakukan sebagai suatu cara untuk membiayai satuan-satuan mereka dan sumber penghasilan pribadi. Keadaan ini amat tidak disenangi oleh Nasution dan para pendukungnya, yang mengingini tentara dapat dikontrol secara efektif oleh pusat, bersatu dan bebas dari campuran sipil.

Tetapi Nasution, di mata lawan-lawannya, juga berkepentingan untuk menggunakan RARE sebagai instrumen untuk mengurangi konsentrasi para perwira yang dapat menghalangi ambisinya. Pertentangan antara kelompok Nasution dan perwira regionalis atau kelompok pendukungnya di Jakarta berbuntut dengan terjadinya "insiden" 17 Oktober 1952, yang memaksanya mundur dari KSAD. Selama tiga tahun kemudian Nasution diskors dari dinas militer, tetapi ia kemudian dapat menyalurkan ambisinya dengan berpolitik, yaitu dengan mendirikan IPKI (Ikatan Perintis Kemerdekaan Indonesia). Partai ini menyediakan saluran baginya untuk mengadakan pendekatan baru dengan Soekarno. Dan

¹⁵ Herbert Faith and Danil S. Lev. "The End of the Indonesia Rebellion", *Pacific Affairs*, Vol. 36, 2 (1963), hal. 33.

¹⁶ Saafuruddin Bahar, "Peranan Elit Sipil dan Elit Militer dalam Dinamika Proses Integrasi Nasional di Indonesia" (Disertasi Diajukan pada Fakultas Pascasarjana Univ. Gadjahmada, 1992), hal. 229.

ia berhasil. Meskipun dikenal anti-PKI sebagaimana umumnya kelompok tentara, tetapi Nasution menerima formula *Nasokom* Soekarno dan dalam satu dan lain cara ia mampu mengidentifikasi dirinya sebagai orang kepercayaan Soekarno. Ini selanjutnya melicinkan jalan baginya untuk kembali menduduki posisi KSAD pada tahun 1956.¹⁷

Sementara pemain ketiga adalah Presiden Soekarno sendiri. Selaku Presiden, ia sebenarnya tidak memiliki kekuasaan riil dalam suatu kabinet parlementer yang dianut pada periode ini. Namun begitu ia memiliki "supporters" di lingkaran partai komunis dan sekelompok kaum radikal nonpartai berkerumun di sekelilingnya; beberapa di antaranya ialah pengagum Tan Malaka, yang berkumpul dalam partai Murba. Sampai tingkat tertentu, ia konsisten dalam memainkan perannya sebagai "patron" (pelindung) dan barangkali lebih tepat sebagai "buffer" antara kekuatan-kekuatan yang berseteru, khususnya di antara militer dan kelompok komunis di tingkat pusat dan kaum regionalis yang berbasis di daerah.

Sebagai alternatif untuk menetralkan ketidakpuasan dan ketegangan-ketegangan yang memuncak selepas Pemilu, Soekarno tidak perlu mengalamatkan kesalahan kepada pihak-pihak tertentu. Dengan bijak ia menuduh "liberalisme" Barat sebagai penyebab ketidakstabilan politik dan menyalahkan sistem multi-partai waktu itu. Suatu kelemahan pokok dalam demokrasi parlementer gaya Barat, demikian Soekarno, terdapat dalam ide oposisi, dan "ide oposisi inilah yang telah menyebabkan kita menderita selama sebelas tahun (merdeka), sebab kita menafsirkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan semangat Indonesia".¹⁸

Semangat Indonesia yang dimaksudkannya ialah suatu konsepsinya sendiri. Dalam pidatonya pada hari peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1956 Soekarno menyerukan untuk menguburkan partai-partai. Dua hari kemudian dia menyatakan bahwa dia mempunyai suatu fikiran, suatu konsepsi tentang sistem baru pengganti yang lama, yaitu apa yang dinamakannya dengan "demokrasi terpimpin". "Konsep saya", demikian Soekarno menyampaikannya dalam pidato beberapa bulan

¹⁷ Hanna, "Bung Karno's Indonesia...: The Indication of the Military", hal. 4.

¹⁸ Dikutip dari Herbert Feith and Lance Castles (eds.), *Indonesian Political Thinking 1945-1965* (Cornell University Press, 1977), hal. 81. [Kata dalam kurung dari penulis]

kemudian (Februari 1957), "terdiri dari dua pokok". Pokok pertama ialah membentuk kabinet koalisi. Di dalam kabinet itu terdapat wakil-wakil dari semua golongan politik yang penting, dan dengan sendirinya memberi jalan kepada kelompok komunis untuk masuk lebih jauh ke dalam orbit kekuasaan. Pokok kedua ialah berkenaan dengan gagasan untuk membentuk suatu Dewan Nasional yang disusun menurut garis fungsional. Dewan itu akan meliputi wakil-wakil buruh, tani, cendekiawan, pengusaha, golongan agama, wanita, pemuda, angkatan bersenjata, polisi dan sebagainya.

Kelompok yang pertama sekali memberikan dukungannya terhadap konsepsi Presiden itu ialah PKI dan Murba, yang memuji-mujinya sebagai penemuan orisinal pemimpin revolusi, sedang sikap resmi militer ambivalen, barangkali karena gagasan konsepsi itu sebagian berasal dari gagasan Nasution sendiri. Hanya kelompok regionalis yang didukung oleh partai-partai Islam dan sosialis (PSI) serta panglima daerah yang menentang keras konsepsi Presiden itu. Moh. Natsir dan pemimpin Masyumi lainnya menentang konsepsi Soekarno itu. PNI dan NU yang menjadi pengagum Soekarno, karena khawatir akan menderita banyak kerugian kalau sistem parlementer yang lama dihapuskan, bersikap men-dua.

Sementara itu, Wakil Presiden Hatta, yang sudah lama diam, lebih duluan menangkap gelagat Soekarno yang semakin menyimpang dari konstitusi dan demokrasi. Ketika Hatta tak lagi mampu mencegahnya, walaupun telah berulang kali diperingatkan, dan karena itu ia tidak dapat meneruskan kerja samanya dengan Soekarno. Pada tanggal 20 Juli 1956 Hatta mengajukan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden, itu terhitung sejak 1 Desember 1956. Kelompok yang paling senang dengan pengunduran diri Hatta ialah PKI karena dengan begitu semakin terbuka pintu bagi mereka untuk masuk lebih jauh ke lingkaran kekuasaan. Lagi pula Hatta memang tidak menyukai PKI, lebih-lebih karena wataknya yang cenderung menempuh cara-cara agitasi dan radikal, tetapi justru agak sejalan dengan gaya Soekarno.

Namun sebaliknya, pengunduran diri Hatta telah menimbulkan *shock* berat di kalangan pemimpin sipil dan militer di daerah, khususnya di Sumatra. Sebab dengan begitu, benteng terakhir mereka di pusat untuk menjadi pengengah atau "penyeimbang" yang dipercaya kini tidak lagi memiliki pengaruh apa-apa dan tentu saja Hatta sendiri adalah orang

Sumatra, suatu sentimen primordial yang sedikit banyak dipertaruhkan pada periode ini dan barangkali juga tetap demikian sampai pada periode kemudian. Pertentangan terbuka dan intrik-intrik politik, teror, "pembredelan" dan penangkapan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan kaum politisi terkemuka sudah berlangsung sejak 1956. Salah seorang dalang dalam persekongkolan-persekongkolan dan konflik-konflik pada tahun-tahun ini ialah Dr. Subandrio, Menteri Luar Negeri dan mantan Duta Besar di Moskow.¹⁹

Tetapi ketegangan-ketegangan di antara ketiga pemain utama di panggung politik nasional pada pertengahan 1950-an tampak semakin kompleks, karena masing-masing memiliki pendukung dalam kelompok yang berbeda. Sebagai contoh misalnya Nasution adalah tokoh yang sangat anti-PKI, tetapi ia juga tokoh yang dikenal dekat dengan Soekarno, yang melindungi PKI. Karena kaum komunis semakin dimusuhi oleh pihak tentara dan partai-partai lainnya, maka Soekarno sekarang lebih senang kepada PKI daripada ke PNI, partainya sejak muda, dan memperhitungkan bahwa nasib PKI akan tergantung pada perlindungannya. Dan bagi Soekarno mereka akan merupakan alat yang dapat dipercaya untuk mengorganisasikan dukungan rakyat yang dianggap menjadi bagian dari dirinya. Bukankah Soekarno sering mengatakan dirinya adalah "penyambung lidah rakyat". Tetapi dengan begitu, PKI agaknya juga memperalat Soekarno untuk mendepak lawan-lawan politiknya.

Sementara itu, kelompok anti Nasution dalam tubuh militer sendiri juga cukup tajam. Pada bulan Agustus 1956, salah seorang pendukung Zulkifli Lubis berusaha menawan Roeslan Abdoelgani, Menteri Luar Negeri dari PNI dengan tuduhan korupsi, tetapi perintah tersebut dibatalkan Nasution. Meskipun sama-sama berasal dari daerah yang sama (Tapanuli Selatan) dan sama-sama beragama Islam, Nasution dan Zulkifli Lubis adalah contoh keruwetan konflik politik dan persaingan dalam tubuh Angkatan Darat. Pada peristiwa lain, Mochtar Lubis, seorang wartawan dan penulis terpandang di Jakarta menuduh Roeslan Abdoelgani terlibat dalam korupsi ditangkap dengan tuduhan menyebarkan fitnah dan tanpa proses pengadilan dijebloskan ke penjara selama

¹⁹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1981), hal. 390.

sembilan tahun. Belakangan Roeslan Abdoelgani diketahui dan mengaku bersalah melakukan pelanggaran "yang tak disengaja" atas tindakan yang dituduhkan kepadanya dan didenda Rp.5000.00 pada bulan April 1957.²⁰ Namun Mochtar Lubis, tokoh anti PKI dan memiliki keteguhan moral yang hebat, tetap mendekam di penjara.

Tampaknya telah terjadi jalan buntu politik di Jakarta. Banyak orang merasakan bahwa sistem konstitusional benar-benar macet, tetapi tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Dalam kebuntuan itulah nantinya Dewan Banteng di Padang mengambil prakarsa sendiri, hingga kemudian berkelanjutan dengan tercetusnya PRRI. Uraian berikut akan menyoroti secara lebih dekat bagaimana ketidakpuasan umum di daerah dan di pusat berakumulasi dengan isu-isu di tingkat nasional hingga mencetuskan PRRI.

Konflik dan Penyelesaian

Pada bulan Oktober 1956 para perwira dan veteran Divisi Banteng mengadakan reuni di Padang. Pertemuan yang dihadiri oleh para undangan dari berbagai daerah di Sumatra dan Jawa direncanakan di Jakarta satu bulan sebelumnya. Pada pertemuan itulah terbentuknya *Dewan Banteng*, dengan program pembangunan daerah di samping mendirikan Yayasan Korp Veteran untuk membantu keluarga veteran yang terlantar dan pemeliharaan taman pahlawan. Tujuan dan program pembangunan Dewan itu telah ditulis dengan baik oleh R.Z. Leirissa dengan baik dalam bukunya *PRRI -Permesta. Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* (Cetakan ke-3 1997).

Dewan Banteng pada mulanya adalah gerakan terbuka untuk memberikan jawaban konstruktif terhadap kekecewaan daerah yang merasa diperlakukan secara tidak demokratis oleh dominasi pusat, baik militer maupun sipil, sebagaimana yang telah diutarakan di muka. Tetapi pada saat yang sama, seperti terlihat dari programnya ia juga merupakan jawaban atas ketidakpuasan nasional atas krisis politik pemerintah yang tidak menguntungkan dan yang semakin digrogoti oleh kelompok komunis.

²⁰ M.C. Ricklefs, *Sajarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1981), hal. 382.

Seperti terlihat dari tuntutan-tuntutan yang diajukannya pada saat-saat terakhir sekitar satu setengah tahun kemudian, Dewan itu juga memprakarsai dilakukannya rujuk nasional. Namun sebagian besar telah terhalang oleh beberapa peristiwa dan aksi teror seperti kasus Cikini dan diblokirnya hubungan-hubungan Hatta, yang telah menjadi rakyat biasa, dengan kalangan pemerintah atau partai-partai.

Untuk lebih mempertegas dan memperlancar program pembangunan yang disusun Dewan disepakati untuk menyerahkan pemerintahan Sumatra Barat dari tangan Gubernur Ruslan Mulyohardjo sejak 20 Desember 1956. Beberapa hari kemudian langkah-langkah untuk membentuk Dewan serupa juga diikuti di Sumatra Utara, dikenal dengan *Dewan Gajah* dan di Sumatra Selatan dengan *Dewan Garuda*. Hal serupa juga berlangsung di Sulawesi, tetapi dikenal dengan Permesta. Dewan-dewan militer dan sipil itu dengan cepat mendapat dukungan rakyat karena mampu melaksanakan program-program konkrit yang dibutuhkan daerah seperti pembangunan atau memperbaiki jalan-jalan, sekolah-sekolah, asrama-asrama tentara dan merangsang pasar yang lesu, dan mereka tampaknya mendapat simpati dari perusahaan asing di pulau itu, termasuk perusahaan minyak Amerika di pulau itu. Dewan juga bergerak membasmi korupsi dan komunis, dikenal dengan gerakan GEBAK (Gerakan Bersama Anti Komunis).²¹ Mereka juga mulai mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap anggota PKI, yang oleh karenanya mengecam kehadiran Dewan di Sumatra itu.

Jakarta tidak dapat mengabaikan kehilangan muka dan kekuasaannya atas luar Jawa, khususnya Sumatra dan Sulawesi. Meskipun upaya-upaya rujuk-nasional pernah dilakukan, jurang perbedaan antara kelompok regionalis dan sentralis atau loyalis semakin tak terjembatani. Pada bulan Maret 1957, menjelang pegunduran dirinya, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menyetujui permintaan Nasution untuk mengumumkan berlakunya SOB (Keadaan Darurat Perang) di seluruh Indonesia, di mana militer diberi hak untuk mengambil tindakan apapun dan di mana pun dan kapan pun juga. Pada awal 1958, seperti yang diutarakan pada awal

²¹ Wawancara (Padang 19 Juni 1994), dengan Kamruddin, Dt. Makhudum, salah seorang tokoh militer yang ikut dalam mempersiapkan pertemuan Divisi Banteng.

makalah ini, konfrontasi langsung PRRI dengan rezim Soekarno tak dapat dielakkan.

Pada mulanya tak begitu jelas seberapa jauh dukungan daerah-daerah lain terhadap PRRI, khususnya bantuan dari para panglimanya serta dari luar negeri, khususnya Amerika Serikat. Juga tidak diketahui apa reaksi yang akan diterima dari Jakarta. Yang jelas suatu peringatan *shock therapy* telah diluncurkan dan dukungan dari hampir semua daerah di luar Jawa, khususnya Sumatra dan Sulawesi sudah dinyatakan secara eksplisit dan setelah beberapa minggu melakukan manuver-manuver menunggu kemungkinan akan terjadinya serangan dari Jakarta, konflik senjata kedua belah pihak akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Ribuan rakyat sipil terbunuh sia-sia, di antaranya juga mahasiswa dan pelajar yang terjun membela PRRI dan begitu banyak bantuan senjata Amerika kepada PRRI jatuh ke tangan musuh, dan sebagian perlengkapan militernya dibinasakan.

Baik bagi PRRI maupun bagi Amerika Serikat, "perang saudara" selama tiga tahun itu sangat "counter-productive". Rakyat Sumatra Barat harus menerima kekalahan dengan segala malapetaka yang ditimbulkannya dan bahkan berdampak negatif jangka panjang. Secara nasional "kemenangan" Jakarta dalam menumpas pergolakan itu juga tidak membawa hasil yang konkrit, kecuali dengan hilangnya kelompok oposisi regionalis, sekarang pemain di panggung politik nasional semakin bergeser kepada PKI, yang secara berangsur-angsur sudah mulai menelusup ke dalam tubuh militer. Ini pulalah terutama yang dikirim untuk yang lebih menentukan terjadi kemudian, ketika munculnya transisi radikal selama tahun-tahun 1965-66, menyusul peristiwa G.30S/1965. Waktu itu rejim Soekarno dan unsur komunis, dua unsur yang sangat ditentang oleh PRRI sebelumnya dibinasakan. Sekali lagi, prakarsa kelompok militer, yang didukung oleh gerakan pelajar dan mahasiswa non-komunis tampil ke permukaan. Jend. Soeharto tiba-tiba menjadi tokoh sentral, dan berhasil menggencet kedudukan Presiden Sukarno menduduki Sumatra Barat.

Sejak itu kelompok komunis semakin berkuasa dan semena-mena. Titik balik dan pengikutnya dari kekuasaan. Sejak itu susul menyusul terjadilah rangkaian aksi-aksi kerusuhan, balas dendam dan pembunuhan, yang menjadi ciri tak asing dalam pergantian rezim.

Penutup

Bagaimanapun juga, berdasar pemahaman terbaik penulis makalah ini terhadap kasus PRRI, baik kelompok PRRI maupun juru bicara resmi pemerintah sama naifnya dalam membaca keadaan riil sezaman. Para pendukung PRRI sama sekali tak bisa didiskreditkan sepenuhnya. Tokoh-tokoh utamanya, seperti Sjafruddin Prawiranegara, Natsir, Asaat, Sumitro, Simbolon, Kawilarang, Sumual dan yang lainnya masih dihormati secara luas di tingkat nasional dan bahkan juga di Jakarta. Dilihat dari ideologinya, maupun para pendukungnya, PRRI sesungguhnya lebih dari sekedar gerakan kaum regionalis, bahkan bisa dikatakan suatu gerakan nasional yang melintasi batas-batas kedaerahan dan latar belakang suku dan agama mereka. Gerakan itu sendiri tetap mengakui konstutusi dan menjunjung negara kesatuan dan tidak satupun ada pernyataan dan maksud dari gerakan PRRI untuk mengadakan pemisahan dari Republik Indonesia yang dilahirkan lewat proklamasi 17 Agustus 1945, kecuali dari rezim Soekarno.

Namun demikian rasa hormat kepada para tokoh-tokoh PRRI tentunya diwarnai oleh ketidakpuasan karena mereka adalah tokoh yang gagal dan mereka sendiri tidak lagi *capable* seperti halnya dengan para pemimpin nasional yang lain yang dalam memecahkan persoalan bangsanya. Di lain pihak, manakala rezim Soekarno di kemudian hari runtuh, jelas bukan karena PRRI, tampaknya pengganti rezim Soekarno tetap memperlakukan tokoh-tokoh PRRI dan rakyat Sumatra Barat sebagai "pemberontak", "petualangan" dan "saparatis", seperti halnya PRRI membenarkan alasannya untuk mengatakan bahwa rezim Jakarta sangat sentralistik, otoriter, korup, tidak demokratis dan bahkan inkonstitusional. Jadi meskipun impas sikap ini tidaklah menyelesaikan, karena tuduh-menuduh, kambing hitam, balas dendam agaknya menjadi ciri sejarah setiap pergantian rezim di Indonesia sejak zaman merdeka dan apakah ini berasal dari warisan sejarah zaman kerajaan lama dan jika demikian, akibat berikutnya bisa diprediksi: kesiastiaan yang tragis dan terlalu mahal terhadap sumber daya manusia dan nasional negeri ini. Terima kasih.